



**KEBIJAKAN PENDUDUKAN PEMERINTAHAN
JEPANG TERHADAP KEHIDUPAN SOSIAL
EKONOMI MASYARAKAT SURABAYA TAHUN
1942-1945**

SKRIPSI

Skripsi diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Sejarah (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sastra.

Oleh

Alifin Istifaroh

NIM. 070110301028

**JURUSAN SEJARAH
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS JEMBER
2014**

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

nama : Alifin Istifarah

NIM : 070110301028

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Pengaruh Pendudukan Pemerintahan Jepang Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Surabaya Tahun 1942-1945” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi manapun. Dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,

Yang menyatakan,

Alifin Istifarah

NIM: 070110301028

PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan oleh:

Dr. Retno Winarni. M. Hum.

NIP. 19590628 198702 2 001

PENGESAHAN

Diterima dan disahkan oleh

Panitia Penguji Skripsi Program Strata 1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra

Universitas Jember

Pada hari :

Tanggal :

Ketua,

Dr. Retno Winarni. M. Hum.

NIP. 19590628 198702 2 001

Anggota 1,

Anggota 2,

Drs. Parwata M.Hum

NIP. 195308011985031002

Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D

NIP. 19580614191987101001

Mengesahkan

Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember,

Dr. Hairus Salikin, M.Ed

NIP. 196310151989021001

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ibunda tercinta Supri Asih dan Ayahanda Hery Kusyanto (Alm), yang selalu mendoakan dengan cinta kasihnya tiada tara,
2. Suamikku tersayang Edy Ariyanto yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi serta do'a,
3. Bapak Mertua Bawon Sucipto dan Ibu Mertua Arina (alm) yang selalu memberikan semangat, dukungan.
4. Ibu Ruwi Julsi SH terhormat yang selalu memberikan dukungan semangat dan do'a,
5. Sahabat-sahabat terdekat dan seluruh Mahasiswa Jurusan Sejarah yang selalu memberikan warna-warni kehidupan penulis baik suka maupun duka,
6. Almamater tercinta Fakultas Sastra Universitas Jember.

MOTTO

“Berikan aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya, berikan aku 1 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia”

(Bung Karno)

Untuk keamanan dan kesentausaan jiwa, kita harus mendekati diri kepada Tuhan Yang Maha Esa, orang yang mendekati diri kepada Tuhan tidak akan terperosok hidupnya, dan tidak akan takut menghadapi cobaan hidup, karena Tuhan akan selalu menuntun dan melimpahkan anugerah yang tidak ternilai harganya.

(Nyi Ageng Serang)

"Ancaman terbesar bagi keberhasilan hidup kita bukan berasal dari menggantungkan cita-cita setinggi langit hingga tak mampu mencapainya secara penuh; namun berasal dari pematokan cita-cita terlalu datar hingga mudah mencapainya."

(Michelangelo)

Anda tidak boleh terlalu sering bertarung hanya dengan satu musuh. Karena anda mengajarkan semua seni bertarung kepada musuh itu.

(Napoleon Bonaparte)

PRAKATA

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini mengkaji tentang Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap Kehidupan sosial ekonomi masyarakat Surabaya dengan judul “*Pengaruh Pendudukan Pemerintahan Jepang Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Surabaya Tahun 1942-1945*” Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan/kepemimpinan dan cara bertindak, oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini ada adalah bagaimana kondisi masyarakat Surabaya sebelum pendudukan Jepang, bagaimana pelaksanaan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial Jepang di kota Surabaya serta bagaimana pengaruh kependudukan Jepang terhadap masyarakat Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perubahan yang terjadi pada masyarakat Surabaya akibat dari kebijakan yang dijalankan oleh Jepang, salah satunya adalah *Romusha* yang menjadikan budak oleh pendudukan Jepang, selain itu juga penghasilan para petani dirampas dengan aturan yang tak masuk akal. Banyak Perempuan-perempuan dijadikan pelacur tak hanya pribumi tetapi pendatang-pendatang yang berparas cantik. Penderitaan tiada henti saat kebijakan Jepang memobilisasi massa untuk mengikuti berbagai organisasi yang ditentukan oleh pemerintah Jepang.

Skripsi adalah hasil tugas penyusunan karya ilmiah mandiri oleh mahasiswa pada akhir masa studinya. Penulis setelah melakukan beberapa kali diskusi dengan para dosen dan rekan mahasiswa, serta melakukan eksplorasi berbagai sumber, akhirnya menetapkan pengaruh pendudukan pemerintahan Jepang terhadap kehidupan sosial ekonomi masyarakat Surabaya tersebut sebagai judul. Kerja keras dalam penyusunan skripsi ini ialah untuk memenuhi salah satu syarat mendapat gelar sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember.

Penyusunan sampai terselesaikannya penulisan karya ilmiah ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu dengan kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih (*Aligato Gozaimas*) kepada:

1. Dr. Hairus Salikin, M.Ed., Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember,
2. Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D, Ketua Jurusan Sejarah,
3. Dr. Retno Winarni, M.Hum., dosen pembimbing yang sangat sabar dengan sepenuh hati telah mengarahkan secara cermat dan meluangkan waktu, pikiran serta perhatian dalam penulisan skripsi ini,
4. Drs. Parwata M. Hum dan Drs. Nawiyanto, M.A., Ph.D, selaku dosen penguji yang dengan sepenuh hati meluangkan waktu dan pikiran dalam penulisan skripsi ini,
5. Ibunda Supri Asih, orang tua yang tidak pernah berhenti mendo'akan, mendukung, serta mencari nafkah sehingga dapat menyelesaikan studi dengan baik,
6. Suamiku Edy Ariyanto yang selalu memberikan inspirasi dan motivasi, dan nasihat yang tiada henti untuk penulis,
7. Bapak Mertuaku Bawon Sucipto dan Ibu Mertuaku Arina (alm) yang selalu memberikan semangat, dukungan dan memndoakan penulis
8. Nenekku Sri Muljatiningsih dan Papa angkatku Djoko Suwito yang selalu memberikan semangat, dukungan dan memndoakan penulis
9. Om H. Pudjiono S.sos dan Tante Hj.Tajril Nurannisa Evi Kristiana yang selalu mendukung dan memberikan semangat dan doa untuk penulis.
10. Ibu Ruwi Julsi SH, selaku pimpinan yang selalu memberikan dukungan dan memberikan banyak toleransi waktu dalam bekerja untuk menyelesaikan skripsi ini.
11. Bunda Sapta Rahayu SH, MKn, yang selalu memberikan dukungan dan semangat dan doa.
12. Sahabat-sahabat terdekat penulis, Uswatun Hasanah S.s, Elly Yuliasutik S.sos, Tita Agustini S.s, Ika Diah Lestari, Wa Ode Nur Hidayah S.s, Siti Munawaroh (Rara), Idam Setyawan S.s, Nawang Wulan Nila Shanti

S.Ind, Priya Purnama S.s, Evi Kristiana S. Bio yang telah menemani dan membantu segala penulisan skripsi ini sehingga terselesaikan dengan baik,

13. Teman-teman penulis, kost Las Vegas Jawa 2 no 10 Jember yang selalu memberikan kebahagiaan untuk penulis
14. Seluruh teman-teman rekan kerja Notaris yang memberikan semangat dan inspirasi untuk penulis.
15. Keluarga besar GMNI yang selalu mendukung dan memberikan inspirasi dan selalu menemani penulis baik suka maupun duka,
16. Perpustakaan Medayu Agung Surabaya yang telah memberikan beberapa referensi buku-buku yang penulis butuhkan,
17. Badan Kearsipan Surabaya yang telah memberikan beberapa referensi artikel dan informasi yang penulis butuhkan
18. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Provinsi Jawa Timur (BASKEBANG) yang telah memberikan alur jalannya penelitian kepada penulis
19. Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Pemerintah Surabaya (BASKEBANG) yang telah memberikan alur jalannya penelitian kepada penulis
20. Perpustakaan Surabaya yang telah memberikan beberapa referensi buku-buku yang penulis butuhkan
21. Teman-teman dan Universitas dari Universitas Gajah Mada Jogjakarta, Universitas Negeri Surabaya, Universitas Airlangga Surabaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Brawijaya Malang, Universitas Muhammadiyah Jember, Universitas IKIP. Semua pihak yang membantu, yang telah memberikan dorongan, semangat, kesempatan berdiskusi, memberikan data, menambahkan referensi buku sehingga membantu dalam penyusunan skripsi ini,
22. Almamater tercinta Universitas Jember.

Semoga atas bantuan arahan, dukungan dan bimbingannya, mudah-mudahan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT.

Untuk kesempurnaan karya ilmiah ini penulis membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember,

Alifin Istifarah

DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN | ii |
| LEMBAR PERSETUJUAN | iii |
| LEMBAR PENGESAHAN | iv |
| PERSEMBAHAN | v |
| MOTTO | vi |
| PRAKATA | vii |
| DAFTAR ISI | x |
| DAFTAR SINGKATAN | xii |
| DAFTAR ISTILAH | xiv |
| DAFTAR TABEL | xvii |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| ABSTRAK | xix |
| ABSTRACT | xx |
| RINGKASAN | xxi |
| | |
| BAB 1 PENDAHULUAN | |
| 1.1 Latar Belakang | 10 |
| 1.2 Perumusan Masalah | 14 |
| 1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan | 15 |
| 1.4 Ruang Lingkup | 16 |
| 1.5 Tinjauan Pustaka | 17 |
| 1.6 Pendekatan dan Kerangka Teori | 22 |
| 1.7 Metode Penelitian | 27 |
| 1.8 Sistematika Penulisan | 28 |
| | |
| BAB 2 GAMBARAN UMUM KARESIDENA SURABAYA SEBELUM TAHUN 1942 | |
| 2.1 Kondisi Geografis | 30 |
| 2.2 Kondisi Demografi | 32 |

| | |
|--|-----|
| 2.3 Kondisi Sosial Ekonomi | 39 |
| 2.4 Kondisi Politik dan Pemerintahan | 42 |
| 2.3.1 Organisasi Budi Utomo | 42 |
| 2.3.2 Organisasi Sarekat Islam | 47 |
| 2.5 Masa Pemerintahan Pada Zaman Hindia Belanda dan Pemerintahan Zaman Jepang | 50 |
| BAB 3 PELAKSANAAN KEBIJAKAN JEPANG | |
| 3.1 Kebijakan Jepang Dibidang Politik dan Pemerintahan Tingkat Supra Desa | 53 |
| 3.2 Kebijakan Jepang Dibidang Politik dan Pemerintahan Bagi Rakyat Desa | 62 |
| 3.2.1 <i>Seinendan</i> | 63 |
| 3.2.2 <i>Jawa Hokokai</i> | 67 |
| 3.2.3 <i>Keibodan</i> | 71 |
| 3.3 Kebijakan Jepang Dibidang Ekonomi | |
| 3.3.1 Sistem Politik Beras | 78 |
| 3.3.2 Wajib Serah Padi | 79 |
| 3.3.3 Distribusi | 83 |
| 3.4 Kebijakan Jepang Dibidang Sosial | |
| 3.4.1 Eksploitasi Tenaga Kerja | 85 |
| 3.4.2 Pendidikan Sosial Ekonomi Masyarakat | 88 |
| 3.5 Dampak Pendudukan Jepang di Kota Surabaya | 99 |
| BAB 4 KESIMPULAN | 103 |
| DAFTAR PUSTAKA | 106 |
| LAMPIRAN | |

DAFTAR SINGKATAN

| | |
|----------|--|
| AD | : Angkatan Darat |
| AU | : Angkatan Udara |
| BB | : <i>Binnelands Bestuur</i> |
| BOW | : <i>Burgerlijk Openbaare Werken</i> |
| CSI | : Central Sarekat Islam |
| ELS | : <i>Eroupeesche Lager School (Sekolah khusus orang Eropa dan Timur Asing)</i> |
| HBS | : <i>Hogere Burger School (Sekolah Menengah Belanda)</i> |
| HCS | : <i>Hollandsch Chineeshe School (Sekolah khusus orang Cina dan Tionghoa)</i> |
| HIS | : <i>Hollandsch Inlandsche School (Sekolah khusus orang kelas atas/elit)</i> |
| ISDP | : <i>Indiesche Sociaal Democratische Partij</i> |
| ISDV | : <i>Indiesche Sociaal Democratische Vereniging</i> |
| LBD | : <i>Lucht Beschermings Diest (Korp Pertahanan Udara Sipil)</i> |
| PARINDRA | : Partai Indonesia Raya |
| PETA | : Pembela Tanah Air |
| PPRI | : Pemuda Pemudi Republik Indonesia |
| PUTERA | : Pusat Tenaga Rakyat |
| RT | : Rukun Tetangga |
| RW | : Rukun Warga |
| SI | : Sarekat Islam |
| SR | : Sarekat Rakyat |
| STOVIA | : <i>School Tot Opleiding Van Inlandsche Artsen</i> |

DAFTAR ISTILAH

| | |
|---------------------------|--|
| <i>Afdeling</i> | : Departemen |
| <i>Arabische Kamp</i> | : Permukiman Orang-orang Arab |
| <i>Arbeidsdient</i> | : Dinas Tenaga Kerja |
| Asosiasi | : Persatuan antara rekan usaha, persekutuan dagang-dagang yang memiliki kepentingan bersama. |
| <i>Balatentara Nippon</i> | : Pasukan militer Jepang |
| <i>Beci Engokal</i> | : Tata usaha pembantu prajurit PETA dan HEIHO |
| <i>Bedrijven</i> | : Urusan Perusahaan |
| Brigade | : Satuan tempur di atas Batalyon |
| <i>Burgemeester</i> | : Walikota |
| <i>Bukyo Kyoku</i> | : Kantor Pengajaran |
| <i>Bundan</i> | : Cabang |
| <i>Chinesche Kamp</i> | : Permukiman orang-orang Cina |
| <i>Chiho Seinendan</i> | : Barisan Pemuda Daerah |
| <i>Chuo Honbucho</i> | : Ketua Kantor Besar |
| <i>Chuo Hoko Kaigi</i> | : Dewan Kebaktian Pusat |
| <i>Chuo Sangi-In</i> | : Dewan Pertimbangan Pusat |
| <i>Cokan Kambo</i> | : Majelis Permusyawaratan Ekonomi |
| <i>Dai Nippon</i> | : Pemerintahan militer Jepang |
| <i>Dancho</i> | : Wakil |
| Demografi | : Ilmu yang mempelajari dinamika kependudukan manusia. |
| Delegasi | : Suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu |
| Distrik | : Kawedanan Kolonial |
| Diktorial Militeristik | : pemimpin negara yang memerintah secara otoriter/tirani dan menindas rakyatnya, yang pemerintahan yang didasarkan pada jaminan keamanannya terletak |

| | | |
|--------------------------|---|---|
| | | pada kekuatan militernya dan mengklaim bahwa perkembangan dan pemeliharaan militernya untuk menjamin kemampuan itu adalah tujuan terpenting dari masyarakat. |
| Distribusi | : | Suatu proses penyampaian barang yang berasal dari produsen kepada konsumen |
| Diskriminasi | : | Perlakuan pembedaan/pengucilan secara langsung atau tidak langsung terhadap orang lain dengan didasarkan ras,suku,warna kulit,agama,dll. |
| <i>Doboku Ka</i> | : | Badan Pekerjaan Umum |
| Eigendom | : | Tanah/ Bangunan |
| Frekuensi | : | Banyaknya sesuatu yang terjadi setiap detiknya |
| <i>Fujinkai</i> | : | Barisan Wanita |
| <i>Fuku Sosai</i> | : | Wakil Pemimpin |
| Gardu | : | Rumah jaga |
| Geologi | : | bentuk ungkapan data dan informasi geologi suatu daerah / wilayah / kawasan dengan tingkat kualitas yang tergantung pada skala peta yang digunakan dan menggambarkan informasi sebaran, jenis dan sifat batuan, umur, stratigrafi, struktur, tektonika, fisiografi dan potensi sumber daya mineral serta energi yang disajikan dalam bentuk gambar dengan warna, simbol dan corak atau gabungan ketiganya.Perkebunan budi daya. |
| <i>Geemente</i> | : | Kotamadya |
| <i>Gunseikanbu</i> | : | Pemerintahan. |
| <i>Gubernemen</i> | : | Tanah eigendom, partikelir, tanah militer, merupakan milik pemerintah |
| <i>Gunseikan Kokanbu</i> | : | Pemimpin Tertinggi |
| <i>Guntyo</i> | : | Seorang Wedana |

| | |
|------------------------|--|
| <i>Gunseikan</i> | : Kepala Pemerintahan Militer Pusat |
| <i>Gun-cho</i> | : Kepala Camat |
| <i>Guto Siha Gakko</i> | : Sekolah Guru 2 tahun |
| <i>Gunshireikan</i> | : Panglima Tentara |
| <i>Gun</i> | : Kawedanan Distrik |
| <i>HEIHO</i> | : Pasukan Pembantu Prajurit Jepang |
| <i>Ho Tjong Hakwan</i> | : Sekolah Julukan Cina |
| <i>Hokokai Shoki</i> | : Pegawai Purnawaktu |
| Ideologi | : Ide atau gagasan |
| <i>Ikka Dai Gakko</i> | : Sekolah Tinggi Kedokteran |
| Invansi | : Aksi militer dimana angkatan bersenjata suatu negara memasuki daerah yang dikuasai oleh suatu negara lain, dengan tujuan menguasai daerah tersebut atau mengubah pemerintahan yang berkuasa. Invasi bisa menjadi penyebab perang, bisa digunakan sebagai strategi untuk menyelesaikan perang, atau bisa menjadi inti dari perang itu sendiri. |
| <i>Inheemschan</i> | : Golongan Pendudukan Jawa |
| <i>Inlander</i> | : Kaum Pribumi |
| Indoktrinasi | : Sebuah proses yang dilakukan berdasarkan satu sistem nilai untuk menanamkan gagasan, sikap, sistem berpikir, perilaku dan kepercayaan tertentu. Praktik ini seringkali dibedakan dari pendidikan karena dalam tindakan ini, orang yang diindoktrinasi diharapkan untuk tidak mempertanyakan atau secara kritis menguji doktrin yang telah mereka pelajari. Instruksi berdasarkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan, khususnya, tak dapat disebut indoktrinasi karena prinsip-prinsip dasar ilmu pengetahuan menuntut evaluasi diri yang kritis dan sikap bertanya yang skeptis terhadap pikiran sendiri |

| | |
|---------------------------------|---|
| <i>Indonesische Studiesclub</i> | : Para Pemuda Kedokteran |
| <i>Indiesche Partij</i> | : Partai politik di Hindia Belanda yang didirikan pada 25 Desember 1912 oleh tiga serangkai |
| Inslulinde | : Kepulauan India, untuk menunjukkan identitas pribumi yang hidup di bagian barat wilayah India- Belanda, sedangkan yang hidup di wilayah timur –Flores, Timor, Maluku dan Papua-sebenarnya adalah orang-orang <i>Melanesia</i> (Kepulauan orang-orang hitam) |
| Interniran | : Tempat pengasingan. |
| <i>Kanji</i> | : Administrator |
| Kamp | : Permukiman |
| Karesidenan | : Pembantu Gubernur |
| <i>Kaigun Goebeng</i> | : Angkatan Laut Gubeng |
| <i>Kaigun Embong</i> | : Angkatan Jalan Orang |
| <i>Wongoe</i> | |
| <i>Kaigun Chuo Kyotei</i> | : Angkatan Laut |
| Kaum Zending | : Kaum Kristen |
| Kabinet | : Suatu badan yang terdiri dari pejabat Pemerintah senior/level tinggi, biasanya |
| <i>Kempetai</i> | : Korps Polisi Militer |
| <i>Keimin Bunka</i> | : Pusat Kebudayaan |
| <i>Shidosho</i> | |
| Krestening Politiek | : Politik Pengkristenan |
| <i>Keisatsubu</i> | : Bagian Kepolisian |
| <i>Ken</i> | : Kabupaten |
| <i>Keibodan</i> | : Barisan Pembantu Polisi |
| <i>Kenkoku Gakuin</i> | : Sekolah Tinggi Pamong Praja |
| <i>Kinrohoshi</i> | : Kerja Bakti |
| Kota Praja | : Pembagian wilayah administratif di Indonesia pada zaman dahulu untuk wilayah perkotaan. Secara |

| | |
|---------------------------|---|
| | administratif, kotapraja merupakan Daerah Tingkat III yang setingkat dengan Kecamatan, dan menjadi bagian dari Daerah Tingkat II (Kabupaten). |
| Kotamadya | : Tanah eigendom, partikelir, tanah militer, merupakan milik pemerintah |
| <i>Kuo Yu</i> | : Bahasa Nasional Tiongkok |
| <i>Komon</i> | : Penasehat |
| <i>Kokumin Gakko</i> | : Pendidikan Dasar |
| <i>Kogyo Gakko</i> | : Sekolah Pertukangan |
| <i>Kogyo Sermon Gakko</i> | : Sekolah Teknik Menengah |
| <i>Kogyo Dai Gakko</i> | : Sekolah Tinggi Teknik |
| <i>Koto Sihan Gakko</i> | : Sekolah Menengah Tinggi |
| <i>Kotsubu</i> | : Departemen Lalu Lintas : Pemerintahan. |
| <i>Ko</i> | : Kelompok Kalangan Elite |
| <i>Ku</i> | : Desa |
| <i>Kuncho</i> | : Kepala Desa |
| <i>Kumiai</i> | : Koperasi |
| <i>Landform</i> | : Bentuk Lahan |
| Lambung Desa | : Tempat menyimpan hasil pertanian (umumnya padi), berbentuk rumah panggung dan berdinding anyaman bambu, rangkian; desa tempat menyimpan berbagai hasil usaha desa, pangan tempat atau bangunan untuk menyimpan padi atau bahan makanan lain untuk menghadapi masa paceklik Sekolah Guru 2 tahun |
| <i>Malaesche Kamp</i> | : Permukiman orang-orang Melayu |
| Manufaktur | : Suatu cabang industri yang mengaplikasikan mesin, peralatan dan tenaga kerja dan suatu medium proses untuk mengubah bahan mentah menjadi barang jadi untuk dijual. |

| | |
|---------------------|---|
| Metropolitan | : Sebuah pusat populasi besar yang terdiri atas satu metropolis besar dan daerah sekitarnya, atau beberapa kota sentral yang saling bertetangga dan daerah sekitarnya. Satu kota besar atau lebih dapat berperan sebagai hub -nya, dan wilayah metropolitan biasanya diberi nama sesuai dengan kota sentral terbesar atau terpenting di dalamnya. |
| Metropolis | : Bandar besar atau kawasan bandar. |
| Mobilisasi | : Kebijakan atau aturan |
| Multicorps | : Aneka tanaman baru |
| <i>Naimubu</i> | : Departemen Urusan dalam Negeri |
| <i>Nipponisasi</i> | : Sistem Militerisasi Jepang |
| <i>Nomin Dojo</i> | : Asrama Sekolah Pertanian |
| <i>Nogyo Kumai</i> | : Koperasi Pertanian |
| <i>Osamu Seirei</i> | : Undang-undang |
| <i>Otsu</i> | : Kelompok Kalangan Biasa |
| Pamong Praja | : Pengurus, pengasuh atau pendidik |
| Pangreh Praja | : Penguasa lokal pada masa pemerintah Kolonial Belanda untuk menangani daerah jajahannya |
| Partikelir | : Tidak untuk umum, bukan milik pemerintah |
| Priyayi | : Golongan kaum bangsawan yang berasal dari kalangan Kraton. |
| Produsen | : Orang atau kelompok yang menghasilkan jasa & Barang |
| Politik Etis | : Politik Balas Budi |
| <i>Residen</i> | : Gubernur Jenderal |
| Representasi | : Perbuatan mewakili, keadaan diwakili |
| Real State | : Mencakup tanah bersama dengan apa pun yang tinggal tetap di atas tanah tersebut, seperti bangunan |
| Rekomendasi | : hal minta perhatian bahwa orang yg disebut dapat |

| | | |
|---------------------------|---|--|
| | | dipercaya, baik (biasa dinyatakan dng surat); penyuguhan, saran yg menganjurkan (membenarkan, menguatkan): pemerintah menyetujui |
| <i>Room Kyoku</i> | : | Dinas Tenaga Kerja |
| <i>Rikugun</i> | : | Angkatan Darat |
| <i>Romusha</i> | : | Sebutan bagi sistem Jepang |
| <i>Seinendan</i> | : | Barisan Pemuda |
| <i>Syuisyintai</i> | : | Barisan Pelopor |
| <i>Shokuryu</i> | : | Kantor |
| Stratifikasi Sosial | : | Pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal (bertingkat) |
| <i>Schakelschool</i> | : | Sekolah Peralihan |
| <i>Seinen Tokubetsu</i> | : | Karesidenan Malang |
| <i>Sosai</i> | : | Pemimpin Tertinggi |
| <i>Shoto Chu Gakko</i> | : | Sekolah Menengah Pertama |
| <i>Syoto Sihan Gakko</i> | : | Sekolah Guru 4 tahun |
| <i>Shi</i> | : | Kota Praja |
| <i>Shityo</i> | : | Walikota |
| <i>Sangyoobu</i> | : | Urusan Perusahaan |
| <i>Saiko Shikikan</i> | : | Panglima Tertinggi |
| <i>Somubu</i> | : | Departemen Urusan Umum |
| <i>Shihobu</i> | : | Departemen Kehakiman |
| <i>Shiku</i> | : | Distrik Kota |
| <i>Tonarigumi</i> | : | Asosiasi lingkungan atau dikenal dengan nama RT dan RW |
| <i>Teishintai</i> | : | Karesidenan Pati |
| <i>Tokubetsu Seieitai</i> | : | Karesidenan Priangan |
| <i>Taesai Yokusankai</i> | : | Pershimpuan Bantuan Pemerintah Kekaisaran |
| <i>Taiso</i> | : | Gerak Badan |
| <i>Tokubetsu Syi</i> | : | Kota Praja Istimewa |

| | | |
|----------------------|---|--|
| <i>Tokubetsu Syi</i> | : | Dewan Pertimbangan di Karesidenan dan Kota Praja |
| <i>Sangikai</i> | : | Istimewa |
| Universal | : | umum |
| Upeti | : | Pajak |
| Ultimatum | : | Sebuah kata dari bahasa Latin, yang bermaksud pernyataan terakhir atau permintaan tak terbatalan yang menjadi bagian dari cara diplomatik terhadap negara lain, dan biasa diikuti dengan perang, jika tak dipenuhi |
| <i>Volksraad</i> | : | Dewan Rakyat |
| YEN | : | Mata Uang Negara Jepang |

DAFTAR TABEL

| Nomor | Judul Tabel | Halaman |
|--------------|---|----------------|
| Tabel 2.1 | Penduduk Kota Surabaya Tahun 1906-1940 | |
| Tabel 3.1 | Anggota Seinendan di Jawa | |
| Tabel 3.2 | Hasil Padi di Jawa Tahun 1930 (Termasuk Jawa Timur) | |
| Tabel 3.3 | Produksi Padi Tiap Karesidenan | |
| Tabel 3.4 | Produksi Pangan Tahun 1941-1944 Surabaya | |
| Tabel 3.5 | Harga Tertinggi Padi Perkuintal (Unit :Y) | |
| Tabel 3.6 | Konsumsi Beras Domestik dan Nondomestik (April Agustus 1943 di Surabaya) | |

DAFTAR LAMPIRAN

| Nomor | Judul Lampiran | Halaman |
|--------------|---|----------------|
| 1 | 7 Desember 1941 : Sebuah perahu kecil mencoba Menyelamatkan para awak USS West Virginia Dari air setelah pemboman Jepang atas Pearl Harbor Di Hawaii | 110 |
| 2 | Aulbertin Walter Southem Mallaby | 110 |
| 3 | Mobil Mallaby yang di bom | 111 |
| 4 | Suasana perang pasukan Inggris dan dan penembakan Mallaby | 111 |
| 5 | Pasukan Mallaby menyerah setelah tewasnya Mallaby di Surabaya | 112 |
| 6 | Pelabuhan Tanjung Perak | 112 |
| 7 | Goa Jepang di Jawa Timur | 113 |
| 8 | Junghun Ianfu | 113 |
| 9 | Suasana Kekalahan Jepang | 114 |
| 10 | Jepang Menyerah pada Sekutu | 114 |
| 11 | Jepang menyerah pada Sekutu dengan Menandatangani perjanjian | 115 |
| 12 | Kondisi penderitaan pribumi akibat kebijakan Jepang | 115 |

| | | |
|----|--------------------------------------|-----|
| 13 | Suasana penyambutan kekalahan Jepang | 116 |
| 14 | Peralihan zaman | 117 |

ABSTRAK

Penelitian iniyang membahas tentang pengaruh kebijakan kependudukan pemerintah Jepang di Surabaya tahun 1942-1945. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan/kepemimpinan dan cara bertindak, oleh karena itu permasalahan dalam penelitian ini ada adalah bagaimana kondisi masyarakat Surabaya sebelum pendudukan Jepang, bagaimana pelaksanaan kebijakan politik, ekonomi, dan sosial Jepang di kota Surabaya serta bagaimana pengaruh kependudukan Jepang terhadap masyarakat Surabaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa banyak perubahan yang terjadi pada masyarakat Surabaya akibat dari kebijakan yang dijalankan oleh Jepang, salah satunya adalah *Romusha* yang menjadikan budak oleh pendudukan Jepang, selain itu juga penghasilan para petani dirampas dengan aturan yang tak masuk akal. Banyak Perempuan-perempuan dijadikan pelacur tak hanya pribumi tetapi pendatang-pendatang yang berparas cantik. Penderitaan tiada henti saat kebijakan Jepang memobilisasi massa untuk mengikuti berbagai organisasi yang ditentukan oleh pemerintah Jepang. Maka dari itu hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penjajahan Jepang meskipun hanya berlangsung selama tiga setengah tahun tetapi sangat menyengsarakan rakyat Indonesia karena rakyat Indonesia dieksploitasi tenaganya, dikuras harta bendanya dan dilecehkan harga diri para perempuannya karena menjadi budak nafsu tentara Jepang.

Kata kunci : Jepang di Indonesia, kehidupan Romusha, Kebijakan Jepang dan Gerakan tiga A

ABSTRACT

Research on the influence of iniyang discuss the population policy the Government of Japan in Surabaya from 1942-1945. A policy is a set of concepts and principles that became the plan outline and implementation of a pekerjaankepemimpinan and how to act, therefore, problems in this study there was how the community conditions of Surabaya before the occupation of Japan, how the implementation of policies in the political, economic, social, and Japan in the city of Surabaya, as well as how the influence of Japan on the community population in Surabaya. Results of the study showed that many of the changes that occurred in the Community policies that are a result of Surabaya dijajakan by Japan, one is made a slave by Romusha occupation of Japan, it also deprived farmers with income rules that do not make sense. Many of the women were prostitutes not only indigenous but pedatang-a gorgeous looking newcomer. Incessant suffering during Japan's policies to mobilize the masses to follow share the organization specified by the Japan Government. Thus the research results it can be concluded that the occupation of Japan though only conducted over the past three years but it is very setengah and miserable people of Indonesia because Indonesia people exploited his energies, drained his wealth and abused the self esteem because of his being a slave to lust for Japan's army.

Keywords: Japan in Indonesia, the life of the policy, Japan Romusha

RINGKASAN

Pengaruh Pendudukan Pemerintahan Jepang Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat Surabaya Tahun 1942-1945.

Invasi Jepang ke selatan dimulai dengan melumpuhkan Armada Amerika di Laut Pasifik, peristiwa yang terjadi pada tanggal 7 Desember 1941. Pada waktu itu Jepang menyerbu pangkalan Angkatan Laut di Pearl Harbour Hawaii, yang menandai pecahnya Perang Dunia ke II.¹ Jepang berhasil dalam ekspansi ini, karena Jepang menggunakan banyak taktik antara lain dengan mengebom Pearl Harbor agar menghentikan kekuatan yang berasal dari negara Amerika Serikat di Asia-Pasifik serta memudahkan dalam menguasai wilayah yang ada di Asia termasuk Indonesia. Selain untuk menambah kekuatan Jepang, Jepang juga menggabungkan diri dengan Jerman dan Italia yang juga terlibat dalam Perang Dunia ke II.

Surabaya pada zaman kolonial mendapatkan status sebagai ibukota Karesidenan Surabaya, namun pada tahun 1905, Surabaya mendapat status Kotamadya atau *Gemeente*. Perubahan status sebagai *Gemeente* dibentuk berdasarkan *Instellingens Ordonansi Staatsblad* No. 1906 No. 149 tanggal 1 April 1906. *Gementee* Surabaya atau administratif meliputi tanah-tanah eigendom, partikelir, tanah militer dan milik pemerintah atau yang disebut *gubernemen*. Secara administrasi *Gemeente* Surabaya terdiri dari satu kawedanan kota yang membawahi 6 kecamatan yaitu, Nyamplungan, Kapasan, Kranggan, Kupang, Krembangan dan Gubeng. Jepang masuk Provinsi Jawa Timur yaitu di Kota Surabaya pada tanggal 8 Maret 1942. Keinginan Jepang merebut Kota Surabaya adalah menguasai wilayah tersebut. Kedatangan Jepang di Surabaya disambut oleh masyarakat pribumi dengan sebuah harapan besar, karena mereka adalah “Saudara Tua” yang nantinya akan membebaskan rakyat pribumi dari penjajahan

¹ Tuk Setyohadi, *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia Dari Masa Ke Masa* (Jakarta: 2002), hlm. 15.

Belanda. Tujuan Jepang menguasai Jawa adalah untuk memperoleh sumber-sumber pangan yang dapat membantu meneruskan operasi militer, dan kemudian menguasai daerah di Asia Tenggara. Jepang melakukan kerjasama dengan kaum pelajar tetapi sedikit dari kaum terpelajar yang mau berhubungan kerja dengan Jepang.

Indoktrinasi dan memobilisasi penduduk pada tingkat masyarakat bawah yang dilakukan Jepang dengan pembentukan *Seinendan*. Organisasi ini diperkenalkan kepada masyarakat Jawa pada hari ulang tahun Kaisar tanggal 29 April 1943. Anggota dari kalangan pribumi antara usia 14 dan 25 tahun, tetapi kemudian diubah menjadi 14 – 22. Fungsi pokok *Seinendan* adalah untuk melatih dan memobilisasikan anggota-anggotanya untuk berbagai kegiatan dengan bermacam-macam tujuan. *Jawa Hokokai* diresmikan pada tanggal 1 Maret 1944. *Jawa Hokokai* merupakan organisasi resmi pemerintah dan langsung dibawah pengawasan pejabat Jepang. Pimpinan tertinggi dipegang oleh *Guneseikan* (Kepala / pemerintahan militer yang dijabat kepala staf tentara). Keanggotaan *Jawa Hokokai* adalah para pemuda yang berusia minimal 14 tahun. Tugas *Jawa Hokokai* adalah menggerakkan rakyat guna mengumpulkan pajak, upeti, dan hasil pertanian rakyat. *Keibodan* dianggap beroperasi melalui usaha-usaha gabungan antara Pangreh Praja dan kepolisian. Di kampung Surabaya, tanggung jawab organisasi ini paling sering jatuh kepada kepala-kepala seksi, ketua-ketua rukun tetangga, dan sejumlah orang yang berpengalaman dalam Korp Pertahanan Udara Sipil/*Lucht Beschermings Dienst (LBD) Belanda*. Latihannya merupakan tanggung jawab polisi dan, kadang kala, tentara. Penerapan latihan ini disusun untuk meningkatkan semangat serta kebiasaan yang teratur, orang Jepang percaya bela diri merupakan hal yang penting dalam pertahanan, serta dibentuk untuk meningkatkan kerja sama dengan para pejabat pemerintah kota Praja, *keibodan* ini tidak dipersenjatai, dan sepenuhnya berada ditangan orang Indonesia, kecuali pada jenjang yang paling atas.

Jawa khususnya Desa dalam persoalan ekonomi, pemerintah pada masa awal pendudukan diarahkan pada pedesaan Jawa, tetapi kota-kota tidak diabaikan atau

dibiarkan untuk tidak terpengaruh. Aspek dorongan Jepang adalah untuk meningkatkan produktivitas mempunyai makna khusus bagi Surabaya. Sistem Politik Beras berbagai macam kegiatan dan proses dari struktur dan fungsi yang bekerja dalam suatu unit atau kesatuan (masyarakat/negara). Sistem politik beras adalah sistem yang bekerja dalam bidang produksi berupa beras untuk kepentingan negara. Bulan Agustus tahun 1942, lima bulan setelah penyerbuan, *Gunseikanbu* (pemerintahan) mulai mengambil langkah untuk melaksanakan pungutan bahan pangan secara sistematis. Pungutan bahan pangan tersebut sampai bulan April 1943, pungutan bahan pangan ini menggunakan Sistem politik beras. Wajib serah padi, Kebijakan ini dimulai pada bulan April tahun 1943, padi yang diserahkan kepada Pemerintah Jepang akan digiling dan didistribusikan melalui tangan pemerintah sendiri. Penyerahan padi yang diterapkan pemerintahan pusat : 1) petani diharuskan menjual sejumlah kuota tertentu di produksi mereka kepada pemerintah dengan harga yg ditetapkan, 2) padi harus diserahkan ke penggilingan beras yang ditunjuk melalui pemerintah desa, 3) jika petani masih memiliki surplus untuk dijual, setelah menyerahkan kuota yang ditetapkan, mereka hanya diperbolehkan menjualnya ke penggilingan yang terdaftar dan tidak diizinkan untuk menjual kepada tengkulak atau pasar, 4) petani dilarang menumbuk gabah untuk kepentingan komersial tanpa izin pemerintah. Distribusi beras, distribusi adalah suatu proses penyampaian barang berupa beras dari produsen ke konsumen dan para pemakai, dari penyerahan padi ke pemerintah pada kantor pusat persatuan penggilingan padi di setiap *karasidenan*.² Dan seluruh jumlah padi yang telah diserahkan dilaporkan ke kantor *karesidenan*. Terdapat 2 kategori yaitu: untuk konsumsi setempat didalam dan untuk di luar *karesidenan* (beras untuk kepentingan militer Angkatan Darat dan Angkatan Udara, ekspor, serta pemasokan lain). Karena permintaan banyak sehingga menurut *Shokuryo Kanri Zimusoho* (SKZ) atau Kantor Pengelolaan Pangan. SKZ memiliki cabang di Semarang dan Surabaya, SKZ bertanggung jawab atas pengenalan seluruh proses pembelian dan distribusi beras di bawah monopoli dagang.

²*Ibid.*, hlm. 93-95.

Eksplorasi tenaga kerja *romusha*, *romusha* sebutan bagi sistem Jepang dengan merekrut orang-orang Indonesia yang kemudian dipekerjakan secara paksa untuk bekerja berat pada zaman pendudukan Jepang. Mereka dipaksa bekerja untuk kepentingan Jepang tanpa diberi upah. *Romusha* berlangsung selama 3 tahun, dari tahun 1942 – 1945. Dengan demikian jelas bahwa didalam bidang pendidikan, pemerintah membatasi adanya perkembangan dengan segala macam jalan. Pada zaman Jepang, pendidikan mengalami perubahan. Sekolah Dasar (*Gokumin Gakko*) diperuntukkan untuk semua warga masyarakat tanpa membedakan status sosialnya. Pendidikan ini ditempuh selama enam tahun. Sekolah menengah dibedakan menjadi dua, yaitu: *Shoto Chu Gakko* (SMP) dan *Chu Gakko* (SMA). Di samping itu, ada Sekolah Pertukangan (*Kogyo Gakko*), Sekolah Teknik Menengah (*Kogyo Sermon Gakko*), dan Sekolah Guru yang dibedakan menjadi tiga tingkatan. Sekolah Guru dua tahun (*Syoto Sihan Gakko*), Sekolah Guru empat tahun (*Guto Sihan Gakko*), dan Sekolah Guru dua tahun (*Koto Sihan Gakko*).

